

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang dapat berkembang pesat dalam menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Fahrial (2018), sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dengan disalurkan dana untuk sektor riil di masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung bank berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Perbankan yang telah disebutkan sebelumnya, jenis bank di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, bank perkreditan rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing (valas), dan perasuransian. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri BPR yang sehat dan efisien agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka kelembagaan industri BPR perlu diperkuat, antara lain pada aspek kepemilikan, kemampuan permodalan, kepengurusan serta perluasan jaringan kantor dalam rangka meningkatkan pelayanan dan daya saing BPR.

Kebijakan atau peraturan yang muncul sebagai salah satu upaya untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional BPR yang melibatkan dana masyarakat adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 58 yang mewajibkan BPR menerapkan fungsi audit intern secara efektif. Dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat dikatakan bahwa audit intern harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan



berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat memengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Fungsi utama dari audit intern di BPR adalah untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.30/12/ KEP/DIR 1997, penilaian tingkat kesehatan BPR diukur dari lima faktor penilaian atau yang biasa disebut dengan analisis metode CAMEL. Faktor-faktor penilaian dalam analisis CAMEL tersebut yaitu *Capital* (Permodalan), *Asset Quality* (Kualitas Aktiva Produktif), *Management* (Manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas). Bagi bank, tujuan penilaian tingkat kesehatan bank adalah memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai input dalam menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank. Sementara bagi regulator, penilaian tingkat kesehatan bank menjadi input dalam menyusun strategi dan rencana pengawasan bank yang efektif, sehingga bersama-sama dengan bank dapat menciptakan individual bank dan sistem perbankan yang sehat dan berkesinambungan.

Dalam rangka memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan pelaksanaan audit internal yang efektif dan memadai. Dengan adanya implementasi audit internal yang memadai, diharapkan dapat menciptakan bank yang sehat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Analisis Implementasi Audit Internal terhadap Tingkat Kesehatan Bank di PT BPR Datagita Mustika”** sebagai tolak ukur atas keberhasilan PT BPR Datagita Mustika dalam mewujudkan bank yang sehat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi audit internal di PT BPR Datagita Mustika?
2. Bagaimana efektivitas implementasi audit internal di PT BPR Datagita Mustika?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank di PT BPR Datagita Mustika?

1.3 Tujuan

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Menguraikan implementasi audit internal di PT BPR Datagita Mustika.
2. Membuktikan efektivitas implementasi audit internal di PT BPR Datagita Mustika.

3. Mengevaluasi tingkat kesehatan bank di PT BPR Datagita Mustika.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penulisan laporan tugas akhir ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, perusahaan, maupun para pembaca. Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Bagi Institut Pertanian Bogor
Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang dapat memberikan sudut pandang lain untuk melihat permasalahan di masa yang akan datang.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk penerapan kebijakan PT BPR Datagita Mustika di masa yang akan datang, serta sebagai masukan yang berguna untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
3. Bagi Penulis
Sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat berpikir kritis dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah didapat dalam perkuliahan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

